

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan permasalahan gizi yang cukup tinggi ditandai dengan adanya masalah gizi pada anak balita dan usia masuk sekolah, seperti *stunting*, *wasting*, *underweight*, dan *overweight*. Padahal untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal salah satunya ditandai dengan keadaan gizi yang baik.¹ Hal ini tentu memperlambat masyarakat Indonesia untuk mencapai kesehatan yang tinggi, jika anak mengalami masalah gizi maka dapat meningkatkan beberapa risiko seperti kesakitan, terganggunya perkembangan kognitif, bahkan kematian.²

Tabel 1.1 Data Survei Status Gizi Nasional 2022

	Hasil Riskesdas		Hasil SSGI		
	2013	2018	2019	2020	2021
<i>Stunting</i>	37,6	30,8	27,7	24,4	21,6
<i>Wasting</i>	12,1	10,2	7,4	7,1	7,7
<i>Underweight</i>	19,6	17,7	16,3	17,0	17,1
<i>Overweight</i>	11,8	8,0	4,5	3,8	3,5

(Sumber : Buku Saku Hasil SSGI Tahun 2022)

¹ Rokom. *Status Gizi Balita dan Interaksinya*. Sehat Negeriku, 2022, (Diambil dari: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20170216/0519737/statusgizi-balita-dan-interaksinya/>), hal 7. Diunduh tanggal 2 Februari 2024.

² Gianfranco, dkk. *Pengaruh Kekurangan Nutrisi Terhadap Perkembangan Sistem Saraf Anak*. J Biomedik. 2021, hal 266–273.

Menurut hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, ditemukan bahwa memiliki prevalensi masing-masing sebesar 21,6%, 7,7%, 17,1%, dan 3,5%. Meskipun kasus stunting dan overweight mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka tersebut masih tinggi bila dibandingkan dengan target pemerintah Indonesia untuk tahun 2024 yang sebesar 14%, serta standar WHO yang membatasi tingkat stunting maksimal 20% dan target SDGs untuk mencapai 0% pada tahun 2030.³ Selain itu, untuk *wasting* dan *underweight* mengalami peningkatan sebesar 0,6% dan 0,1% persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data ini diperkuat dengan pernyataan Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, menekankan bahwa isu gizi merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dengan serius karena konsekuensinya dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan anak hingga dewasa.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi balita stunting di Jawa Barat mencapai 20,2%. Artinya, 20 dari 100 balita di Jawa Barat mengalami stunting. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, yaitu 21,6%. Meskipun lebih rendah dari rata-rata nasional, prevalensi stunting di Jawa Barat masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini karena stunting dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada perkembangan anak, baik fisik maupun mental, dan dapat berakibat jangka panjang hingga ke masa dewasa. Penyebaran kasus stunting di Jawa Barat tidak merata. Kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Kabupaten Sumedang (27,6%), diikuti oleh Kabupaten Cianjur (27,5%) dan Kabupaten Bandung (27,4%). Di sisi lain, Kota Bekasi (13,4%), Kota Depok (14,5%), dan Kabupaten Karawang (15,2%) memiliki prevalensi stunting terendah di Jawa Barat.

Berdasarkan sumber yang sama, prevalensi *wasting* (berat badan menurut tinggi badan) di Jawa Barat mencapai 6,0%. Ini berarti bahwa 6 dari 100 balita di Jawa Barat memiliki berat badan kurang dari standar untuk tinggi badannya. Angka

³ Anggi Tria dan Nurul Dina. “Analisis Faktor Risiko Kejadian Stunted, Underweight, dan Wasted Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Rangkapan Jaya, Kota Depok, Jawa Barat”, Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan. 2020.

ini lebih rendah dibandingkan dengan prevalensi wasting nasional sebesar 7,7%. Meskipun lebih baik dari rata-rata nasional, prevalensi wasting di Jawa Barat masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius pemerintah. Wasting adalah kondisi kekurangan berat badan yang parah dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengatasi masalah wasting di provinsi ini. Upaya untuk mengatasi wasting perlu dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah perlu terus meningkatkan program-program pencegahan dan penanganan wasting, seperti penyediaan makanan bergizi, edukasi tentang pola makan sehat, dan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Masyarakat juga perlu berperan aktif dengan memastikan anak-anak mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan prevalensi wasting di Jawa Barat dapat diturunkan dan anak-anak di Jawa Barat dapat tumbuh kembang dengan sehat.

Masih dari sumber yang sama, juga menunjukkan bahwa prevalensi *underweight* (berat badan kurang dari standar untuk usianya) di Jawa Barat mencapai 14,2%. Ini berarti bahwa 14,2 dari 100 balita di Jawa Barat memiliki berat badan kurang dari standar untuk usianya. Meskipun prevalensi *underweight* di Jawa Barat lebih rendah dibandingkan dengan prevalensi *underweight* nasional sebesar 15,3%, angka ini masih tergolong tinggi dan memerlukan perhatian. *Underweight* dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada anak, seperti stunting, keterlambatan perkembangan, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

Yang terakhir, prevalensi balita *overweight* di Jawa Barat mencapai **3,8%**. Angka ini menunjukkan bahwa 3 dari 100 balita di Jawa Barat mengalami *overweight*. Angka prevalensi balita *overweight* di Jawa Barat ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, yaitu 3,5%. Prevalensi balita *overweight* di Jawa Barat bervariasi antar kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan prevalensi balita *overweight* tertinggi adalah Kota Bogor (5,1%), diikuti oleh Kota Bekasi (4,8%), dan Kabupaten Bandung (4,7%). Kabupaten/kota dengan prevalensi balita *overweight* terendah adalah Kabupaten Garut (2,6%), Kabupaten Ciamis (2,7%), dan Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan data SSGI di wilayah Jawa Barat tahun 2021, dapat kita lihat prevalensi keempat masalah gizi ini masih terbilang tinggi. Terutama pada *overweight* yang masih 0,3% diatas rata-rata prevalensi nasional, yaitu sebesar 3,8%. Sementara itu, prevalensi balita stunting di Kota Depok cukup rendah, yaitu sebesar 3,5% pada tahun 2021. Walaupun demikian, permasalahan gizi pada anak ini tidak dapat dianggap remeh dan tetap menjadi pengawasan Pemerintah Kota Depok. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan pelayanan program perbaikan gizi pada wilayah kerja Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat seperti Puskesmas dan Posyandu.

Penilaian masalah gizi pada anak, seperti *stunting*, *wasting*, *underweight*, dan *overweight* menggunakan pengukuran tinggi/panjang badan, berat badan, dan umur, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Seorang balita dianggap mengalami *stunting* jika indeks tinggi badan atau panjang badan menurut umur (TB/U atau PB/U) berada di bawah -2 standar deviasi (SD). *Wasting* terjadi jika berat badan menurut tinggi atau panjang badan (BB/TB atau BB/PB) berada di bawah -2 SD. *Underweight* dikategorikan jika indeks berat badan menurut umur (BB/U) berada di bawah -2 SD, sedangkan *overweight* terjadi jika berat badan menurut tinggi atau panjang badan (BB/TB atau BB/PB) berada di atas 2 hingga 3 SD.

Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya pelayanan yang diselenggarakan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi yang difasilitasi pemerintah, baik pemerintah daerah atau masyarakat. Salah satu bentuk fasilitas kesehatan ialah Puskesmas. Puskesmas berdiri sebagai fondasi sistem layanan kesehatan di Indonesia, memainkan peran penting dalam memberikan layanan kesehatan dasar yang penting bagi masyarakat di seluruh negeri. Fasilitas-fasilitas ini mewujudkan prinsip-prinsip layanan kesehatan preventif dan promotif, yang memprioritaskan pencegahan penyakit dan promosi kesehatan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah jangkauannya

masing-masing.⁴ Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan dan memfasilitasi akses terhadap layanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita. Posyandu, Polindes (Rumah Bersalin Desa), dan Desa Siaga adalah contoh UKBM. Keberhasilan pelayanan kesehatan ini tergantung pada keterlibatan aktif masyarakat baik sebagai pemberi maupun penerima pelayanan.

Posyandu berperan sebagai penyedia layanan kesehatan penting dan dukungan di bidang sosial yang mudah diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ini berfungsi sebagai landasan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Peran Posyandu yang beragam sebagai penyedia layanan kesehatan berbasis masyarakat dan mitra strategis pemerintahan daerah. Kombinasi fungsi yang unik ini menempatkan Posyandu sebagai elemen penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal itulah yang membuat peran kader posyandu menjadi sangat penting dalam keberhasilan program pelayanan posyandu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Theodorus Indarto dari Puskesmas Ngaglik 2 yaitu “Peran kader menjadi sangat krusial mengingat bahwa sekarang ini tugas mereka di posyandu jauh lebih dari sekadar menimbang bayi. Dengan program-program kesehatan yang semakin terintegrasi di desa-desa, penting bagi para kader untuk dilengkapi dengan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak, perawatan ibu hamil, kesehatan lanjut usia, serta isu stunting.” pada pertemuan di Balai Kelurahan Donoharjo, Ngaglik, Sleman (21/12/2021).⁵

Namun merujuk pada isu yang ada, tepatnya pada wawancara singkat yang telah peneliti ikuti di Posyandu Mawar RW 08 Sukatani Depok, pada tanggal 8 Maret 2024. Peneliti mendapat informasi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan berjalan kurang maksimal. Heny, salah satu kader Posyandu

⁴ Biro Hukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 2014
(http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK%20No.%2075%20ttg%20Puskesmas.pdf)
) Diunduh tanggal 7 Januari 2024.

⁵ Kecamatan Ngaglik. *Pemerintah Kabupaten Sleman Kapanewon Ngaglik*, 2021
(<https://ngaglik.slemankab.go.id/pentingnya-peran-kader-posyandu-dalam-memberikan-pelayanan.slm>) Diunduh tanggal 7 Januari 2024.

Mawar RW 08 mengatakan bahwa kekurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesulitan mengajak ibu dan balita untuk datang ke posyandu yang mana hal tersebut disebabkan oleh kurang waspadanya ibu balita terkait gizi balita (ibu balita menganggap jika balita sudah mendapat pemberian imunisasi lengkap maka tidak perlu lagi datang ke posyandu), kurangnya fasilitas yang tersedia, dan tidak adanya tempat khusus posyandu. Sehingga kader posyandu mengalami kesulitan juga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita.

Hal ini tentunya menjadi masalah yang memunculkan pertanyaan, "bagaimana mungkin kader posyandu dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan balita dengan baik jika kader saja masih kesulitan untuk mengajak dan memantau sasaran pelayanan tersebut?". Dari diskusi tersebut adapun solusi yang ditemukan ialah para kader mengharapkan adanya peningkatan fasilitas seperti media atau sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjangkau sasaran pelayanan tersebut.

Dilihat dari permasalahan tersebut, sebenarnya adanya penyuluhan terkait pentingnya datang ke posyandu merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kewaspadaan ibu balita terkait gizi balita, namun hal tersebut belum bisa terealisasikan dikarenakan belum adanya tempat yang tetap untuk posyandu dan belum tersedianya anggaran untuk penyediaan tempat tersebut. Hal ini diperkuat oleh Marnah, selaku anggota kader Posyandu Mawar RW 08 Sukatani Depok bahwa "belum dapat dilakukan penyuluhan dikarenakan belum ada tempat khusus posyandu dan belum ada anggaran yang tersedia untuk pembangunan tempat khusus posyandu, jadi sejauh ini penyediaan tempat hanya mengandalkan warga yang tempatnya bersedia untuk digunakan (itupun tidak pasti) apabila tidak ada maka pelayanan tidak dilakukan". Sehingga diperlukan opsi lain yang dapat digunakan sebagai solusi alternatif dari permasalahan ini.

Peneliti akhirnya melakukan penelitian lebih lanjut yaitu dengan menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan beberapa informasi terkait identitas mengidentifikasi kebutuhan warga belajar lebih lanjut, dan sebagainya. Kuesioner disebar kepada 11 responden yaitu kader Posyandu Mawar RW 08 Sukatani Depok.

Hasil dari kuesioner yaitu terdapat 7 responden yang menjawab hanya tahu saja mengenai gizi balita dan ingin menambah pengetahuan tentang gizi balita, dan 4 responden menjawab sangat paham mengenai gizi balita melalui platform seperti youtube dan website, namun tetap tertarik menambah pengetahuan tentang gizi balita. Berdasarkan data tersebut, peneliti mendapatkan informasi tambahan bahwasanya hanya beberapa kader saja yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai gizi balita (hanya sekedar tahu saja). Hal tersebut memunculkan masalah baru, yang mana seharusnya sebagai seorang kader memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan anggota ataupun pengguna posyandu lainnya.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti membuat media yang ditujukan kepada 11 kader posyandu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai gizi balita yang nantinya media tersebut digunakan sebagai alat pembelajaran yang dapat mempermudah proses pembelajaran, dapat digunakan sebagai alat bantu pengganti kegiatan penyuluhan ketika pelayanan berjalan, dan menjadi fasilitas tambahan untuk posyandu.

Untuk mengetahui lebih spesifik mengenai jenis media yang dibutuhkan oleh warga belajar, dalam kuesioner peneliti juga mencantumkan 3 (tiga) pilihan media yaitu: 1) Video pembelajaran audio visual, 2) Buku saku (cetak) mengenai penjelasan materi dan monitoring perkembangan ibu balita 3) *E-Booklet*. Beserta dengan alasan pilihan. Hasil dari kuesioner tersebut yaitu terdapat 8 responden yang memilih buku saku dengan alasan simple, praktis dan mudah dibawa kemanapun karena berbentuk cetak dan berukuran kecil; 2 responden memilih buku elektronik dengan alasan fleksibel dalam segi waktu, dapat digunakan dimana saja, dan tidak perlu ribet membawa buku karena materi sudah tersimpan didalam *gadget*; dan 1 responden memilih video pembelajaran audio visual dengan alasan lebih materi lebih mudah dicerna apabila disajikan dalam bentuk video.

Setelah menyebarkan kuesioner, peneliti menentukan media pembelajaran yang cocok untuk warga belajar. Dalam menentukan media pembelajaran peneliti menggunakan kriteria pemilihan media pembelajaran sebagai tolak ukur dalam menentukan media, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kelemahan dari

media yang akan digunakan nantinya. Adapun beberapa kriteria tersebut, yaitu: 1) Cocok dengan maksud yang ingin dicapai; 2) Ketepatan; 3) Sensibilitas, fleksibilitas, dan durabilitas; 4) guru harus terampil menggunakan media; 5) Mutu dan kualitas dalam perancangan media; 5) Penggunaan media harus sesuai dengan taraf berpikir warga belajar.⁶

Berdasarkan kriteria dan hasil analisa, peneliti dapat menemukan dan menentukan bahwa media yang dibutuhkan dan cocok untuk warga belajar ialah buku saku dengan materi gizi balita. Buku saku sesuai dalam penelitian ini karena: 1) cocok dengan maksud yang ingin dicapai yaitu menjadikan buku saku sebagai media pembelajaran bagi kader posyandu; 2) Buku saku merupakan media pembelajaran yang tepat karena telah disesuaikan dengan karakteristik warga belajar (melalui kuesioner identifikasi yang telah disebarkan); 3) waktu serta biaya yang digunakan dalam pembuatan buku saku masih dalam kemampuan dan jangkauan peneliti; 4) penggunaan media buku saku ini disesuaikan dengan taraf berpikir warga belajar, yang mana hampir semua warga belajar berusia diatas 40 tahun yang kurang mengerti mengenai penggunaan teknologi lebih dalam. Hal ini dibuktikan pada saat pengisian kuesioner online, yang mana untuk pengisiannya peneliti harus mengajarkan dan mengarahkannya terlebih dahulu. Sehingga untuk penelitian ini kurang memungkinkan dikembangkannya media dalam bentuk digital seperti video pembelajaran audio visual dan *ebooklet*; 5) Buku saku ini sangat praktis digunakan. Buku saku memiliki ukuran kecil, ringan, dan praktis berisi informasi yang bisa dibawa dan dibaca kapan saja oleh pemiliknya. Karakteristik buku saku meliputi: (1) Ukurannya kecil sehingga mudah disimpan di saku baju atau celana dan dapat dibawa ke mana saja untuk dibaca kapan saja; (2) Isinya disusun dengan singkat sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami inti dari informasi yang terkandung di dalamnya. Kepraktisan buku saku yang memungkinkan dibawa ke mana-mana oleh pembacanya dapat meningkatkan motivasi untuk membacanya.⁷ Tidak seperti media pembelajaran lain yaitu video

⁶ Rahmi Mudia, dkk. *Media Pembelajaran* (Sumatera : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 4.

⁷ Elvira Firdausi Nuzula dan Abdur Rahman As'ari. 2013. *Pengembangan Buku Saku Volume Kubus, Balok, dan Limas sebagai Media Pembelajaran untuk Siswa SMP*, (Thesis), vol 6(3).

pembelajaran audio visual atau *ebooklet* yang penyimpanannya memerlukan memori yang cukup besar dan tidak semua warga belajar memiliki kapasitas memori yang cukup untuk menyimpan video atau file media pembelajaran dalam *gadget*.

Menindaklanjuti data yang telah diperoleh, peneliti mengadakan pertemuan singkat Pada 27 Maret 2024 dengan penanggung jawab kader Posyandu Mawar RW 08 Sukatani Depok, Siti Chodijah. Terkait maksud dan tujuan peneliti untuk mengembangkan media buku saku. Beliau mengatakan bahwa ia setuju dengan adanya pengembangan media buku saku, hal ini diperkuat juga dengan alasan bahwasanya belum ada media yang simple dan praktis digunakan sebagai media pembelajaran di posyandu.

Berdasarkan informasi dan data yang telah diperoleh, peneliti akan melanjutkan penelitian lebih dalam yaitu dengan melakukan **“Pengembangan Media Buku Saku Untuk Meningkatkan Pengetahuan Gizi Balita Bagi Kader Posyandu Mawar Rw 08 Sukatani Depok”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dari penelitian ”Pengembangan Media Buku Saku Untuk Meningkatkan Pengetahuan Gizi Balita Pada Kader Posyandu Mawar RW 08 Sukatani Depok” sebagai berikut:

1. Kader kesulitan mengajak ibu dan balita untuk rutin ke posyandu dikarenakan kurang waspadanya ibu balita terkait gizi balita.
2. Beberapa kader posyandu tidak memiliki pemahaman yang cukup (hanya sekedar tahu saja) mengenai pelayanan gizi yang dilakukan.
3. Kader posyandu mengharapkan adanya media atau sesuatu yang dapat dijadikan alat bantu dan pegangan untuk menjangkau sasaran pelayanan posyandu Mawar RW 08 Sukatani Depok.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, dari analisis tersebut dapat disimpulkan pembatasan masalah penelitian yaitu "Pengembangan Media Buku Saku Untuk Meningkatkan Pengetahuan Gizi Balita Pada Kader Posyandu Mawar RW 08 Sukatani Depok"

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian "Pengembangan Media Buku Saku Untuk Meningkatkan Pengetahuan Gizi Balita Pada Kader Posyandu Mawar RW 08 Sukatani Depok" adalah sebagai berikut:

1. Apa saja tahapan yang perlu dilakukan dalam pengembangan media buku saku untuk meningkatkan pengetahuan gizi balita?
2. Apakah buku saku ini layak digunakan sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan gizi balita pada kader Posyandu Mawar RW 08 Sukatani Depok?
3. Bagaimana pengembangan media buku saku ini dapat meningkatkan pengetahuan pada kader Posyandu Mawar RW 08 Sukatani Depok?

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman penting dalam memberikan dan memperluas wawasan, pengetahuan, serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh mengenai pengembangan media buku saku ini dapat meningkatkan pengetahuan pada kader Posyandu Mawar RW 08 Sukatani Depok

2. Bagi Kader Posyandu

Kader Posyandu dapat memahami dengan mudah terkait media pembelajaran gizi balita dengan memberikan variasi media pembelajaran yang menarik.

3. Bagi Prodi Pendidikan Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa Prodi Pendidikan Masyarakat untuk penelitian selanjutnya atau sebagai tambahan informasi akademis.

